

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Tahap Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Alat Pengumpulan Data.....	31
6. Metode Analisis Data.....	32
7. Lokasi Penelitian.....	33
8. Jadwal Penelitian.....	34

G. Sistematika Penelitian.....	35
--------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PENGGUNAAN, IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF DAN LEGALITAS TERHADAP SPEED BUMPER**

A. Implementasi Penggunaan Speed Bumper.....	37
B. Penegakan Hukum.....	42
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	42
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum.....	45
3. Penegakan Hukum Administrasi Indonesia.....	47

**BAB III KEBERADAAN SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG SERTA PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN SPEED BUMPER.**

A. Keberadaan Speed Bumper di Kabupaten Bandung.....	49
B. Keberadaan dan Pemasangan Polisi Tidur Di Jalan Umum.....	53
1. Latar Belakang Pemasangan Polisi Tidur.....	53
2. Respon Masyarakat Luas Kecamatan Dayeuhkolot Mengenai Pemasangan Alat Penghambat Jalan atau Speed Bumper Di Jalan Umum.....	54
3. Pendapat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Terhadap Alat Penghambat Jalan Speed Bumper Di Wilayah Kabupaten Bandung.....	56
C. Kerugian Masyarakat Terhadap Pembangunan Alat Pengendali Kecepatan Yang Tidak Sesuai Standar.....	59

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN ALAT SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DAN MERUGIKAN PENGGUNA JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN**

A. Penerapan Aturan Peraturan Perundangan Terkait Dengan Adanya Pembangunan Speed Bumper.....	64
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Speed Bumper yang Merugikan di Kabupaten Bandung.....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA.....76**

**LAMPIRAN.....82**

